

THE DYNAMICS OF GENDER EQUALITY AND NEW DIRECTIONS FOR THE ROLE OF SAUDI WOMEN

DINAMIKA KESETARAAN GENDER DAN ARAH BARU PERAN PEREMPUAN ARAB SAUDI

Akhmad Saikuddin^{1*}, Abdul Karim Amrullah²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

²University of Al Azhar, Egypt

*Corresponding author: addyn13@gmail.com

ABSTRACT

Article history:

Received

July 2022

Revised

December 2022

Accepted

June 2023

Keywords:

**Gender;
Saudi Women;
reformation;
Arab vision 2030**

Kata Kunci:

**Gender;
perempuan
Saudi; reformasi;
superioritas; visi
Arab 2030**

This is an open access
article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



This article discusses the dynamics of gender equality between men and women in Saudi Arabia, operating under a patriarchal social structure and ultra-conservative Wahhabi theology. Unlike previous studies, this piece investigates how Saudi Arabia's policies towards women are predicated on rational choices to maximize the nation's interests. The research follows a qualitative approach, employing authoritative books, journals, and web articles as data sources. The findings illustrate that gender equality between men and women in Saudi Arabia is continuously changing in response to the country's social conditions and general interests. Over recent decades, Saudi women have faced strict restrictions, mainly confined to the domestic sphere, with only a minority holding positions in the public domain. Given these circumstances, Saudi Arabia faces no alternative but to initiate a significant revolution within society's cultural and social fabric, specifically reforming women's role in the public sphere.

ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika kesetaraan gender antara pria dan perempuan di Arab Saudi dalam struktur sosial patriarkal dan teologi Wahhabi yang ultra-konservatif. Di antara penelitian terdahulu, artikel ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana kebijakan Arab Saudi terhadap perempuan didasarkan pada pilihan rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasional Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan literatur berupa buku-buku otoritatif, jurnal, dan artikel web sebagai data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Arab Saudi mengalami dinamika yang terus berubah sesuai dengan kondisi sosial dan kepentingan yang terjadi di negara tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan Saudi telah mengalami pembatasan yang ketat, peran mereka terbatas pada ranah domestik, dan sedikit perempuan Arab Saudi yang memiliki peran di ranah publik. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi Saudi kecuali melakukan revolusi besar-besaran di bidang budaya dan sosial masyarakat, khususnya mereformasi peran perempuan di ranah publik.

PENDAHULUAN

Tema yang selalu aktual untuk diperbincangkan salah satunya adalah terkait tema perempuan, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Selama ini, di banyak negara Islam yang sangat kental dengan budaya patriarki, perempuan selalu ditempatkan pada posisi di bawah laki-laki dengan peran dan gerak yang sangat terbatas hanya di ranah privat, terlebih kalau kita membaca teks-teks fikih klasik yang mayoritas dikarang oleh ulama dari kalangan laki-laki sehingga dalam pembahasan mengenai relasi laki-laki dan perempuan sering kali terjadi bias dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan (Ismail, 2015: 42). Padahal, perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki meskipun dalam beberapa hal jelas antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Akan tetapi, mengesampingkan peran perempuan terlebih memarjinalkannya tentu tidak dapat dibenarkan. Domestifikasi perempuan alih-alih memberikan rasa aman dan nyaman karena dunia luar dianggap tidak ramah justru membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya untuk berperan lebih aktif di tengah masyarakat.

Marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi di banyak negara, terutama negara yang mengklaim sebagai negara Islam, salah satunya adalah Arab Saudi, di mana dalam beberapa dekade terakhir perempuan Saudi mengalami aneka tindakan diskriminatif disebabkan kebijakan pemerintah Saudi yang rigid. Kebijakan pemerintah Saudi terbentuk salah satunya lantaran pengaruh fatwa dan doktrin teologi Wahabi yang menjadi mazhab mayoritas di Saudi sekaligus menjadi mazhab resmi negara. Selama Saudi menerapkan kebijakan berlandaskan fatwa ulama Wahabi, maka bersamaan dengan itu pula perempuan Saudi hidup dalam keterkungkungan dan keterbatasan gerak, khususnya di ranah publik.

Perempuan di Saudi selama bertahun-tahun lamanya hidup dalam keterbatasan gerak. Mereka tidak dapat melibatkan diri dalam sektor publik atau hanya sekadar beraktivitas di luar rumah. Yang melanggar aturan tersebut tentu akan berhadapan dengan hukum setempat. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh perempuan Saudi yang memprotes larangan mengemudi sebagaimana termaktub dalam fatwa Lembaga Ulama Senior Saudi (*Hai'ah Kibar 'Ulama*) pada 1990. Protes ini kemudian berujung pada tindakan represif dari otoritas setempat terhadap para demonstran (Mujihastuti, 2019). Perempuan Saudi juga harus berurusan dengan hukum tatkala melakukan serangkaian protes terkait regulasi pembuatan paspor yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki sesuai dengan Dekrit Kerajaan yang dirilis pada tahun 2000. Peraturan ini dinilai sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Mereka yang menabrak larangan ini akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) dan dilarang melakukan perjalanan (I.B. Bank, 2022). Beberapa kasus terkait perempuan di atas mengindikasikan bahwa Saudi menjadi salah satu negara dengan kesenjangan gender cukup tinggi dan berada pada peringkat 141 dari 144 negara berdasarkan Global Gender Gap Report 2016 yang fokus mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik (Hardiyanti, 2021: 2).

Situasi agak sedikit berbeda ketika memasuki tahun 2018. Saudi di bawah titah Raja Salman tengah menuju ke arah baru, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Keran kebebasan perempuan dibuka seluas-luasnya agar perempuan dapat berperan aktif di sektor publik. Dewasa ini, perempuan Saudi tidak sedikit yang dapat bebas menghirup udara segar dengan melakukan aktivitas di ruang publik, baik untuk urusan pekerjaan maupun urusan lainnya. Stigma buruk Saudi di mata internasional sebagai negara eksklusif dan konservatif berangsur membaik disebabkan pemberian hak-hak secara penuh terhadap perempuan.

Secara normatif dan substansial, Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dan egaliter. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Hujurat (49) ayat 13 terkait relasi laki-laki dan perempuan. Namun, struktur sosial pada zaman Nabi tidak benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini, tetapi

harus menggunakan pandangan sosiologis dan pragmatis. Struktur sosial pada masa Nabi tentu berbeda dengan masa sekarang yang sudah memasuki era keterbukaan, industri, dan teknologi, ketika antara satu orang dan yang lainnya bisa saling terkoneksi dengan mudah. Domestifikasi perempuan tentu menjadi tidak relevan dan perlu adanya rekonstruksi pemahaman terhadap peran perempuan, khususnya di ruang publik (Nuryanto, 2007: 396).

Dari pemaparan di atas ada beberapa pertanyaan yang hendak diketengahkan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika kesetaraan gender di Arab Saudi dalam lintasan sejarah, bagaimana pandangan ulama Wahabi yang ultra-konservatif terkait kesetaraan gender, mengapa Saudi memilih untuk mereformasi kehidupan sosial masyarakat alih-alih mempertahankan konservatisme yang telah mengakar sejak Saudi pertama kali berdiri dan ke mana arah baru perempuan Saudi hari ini dalam konteks kesetaraan gender. Beberapa pertanyaan tersebut akan penulis jawab dengan menggunakan penelitian kualitatif dan merujuk pada sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel web yang akan menjadi referensi penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Perempuan Saudi dalam Lintasan Sejarah

Secara demografis, Saudi menjadi salah satu negara di Timur Tengah dengan populasi perempuan cukup tinggi. Berdasarkan data World Bank Group, populasi perempuan Saudi pada 2020 mencapai 14.682.559 atau 42,2% dari total populasi penduduk Saudi. Jumlah populasi perempuan Saudi terus meningkat sejak 1960 yang hanya berjumlah 2.034.339 (The World Bank, 2022). Populasi perempuan Saudi yang pada 2020 hampir mencapai 50 persen mestinya menjadikan Saudi lebih terbuka dan lebih memikirkan nasib perempuan berikut pemberdayaannya dari berbagai sektor. Namun faktanya, dalam beberapa dekade terakhir, perempuan Saudi menghadapi aneka macam larangan dan pembatasan yang disebabkan interpretasi fundamental Saudi atas teks Al-Qur'an dan teks keagamaan lain yang dianggap otoritatif (Bowen, 2014: 14).

Konstruksi masyarakat Saudi ditentukan oleh dua faktor, yaitu tribalisme dan afiliasi keagamaan, sehingga cukup sulit untuk membedakan mana kebijakan yang dikonstruksi berdasarkan hukum Islam (*syari'ah*) yang konservatif dan berdasarkan norma tradisi Arab Saudi (Al-Hareth, 2012: 122). Apalagi diperkuat dengan fakta bahwa sistem sosial di Saudi sangat didominasi oleh laki-laki (*male oriented*). Segregasi antara perempuan dan laki-laki di Saudi terlihat sangat kentara. Posisi laki-laki diletakkan tepat di atas perempuan sehingga dalam banyak hal, laki-laki dianggap lebih unggul dan pantas untuk melakukan pekerjaan yang menurut pandangan umum tidak lazim dilakukan oleh perempuan. Kompleksitas permasalahan perempuan di Saudi juga tecermin dalam beberapa domain, di antaranya keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Gerak mereka di ruang publik juga sangat dibatasi, seperti bepergian tanpa mahram dan mengendarai mobil (Mobaraki, 116).

Pendidikan merupakan salah satu isu yang sangat tabu bagi perempuan setidaknya hingga tahun 1956 ketika Saudi dipimpin oleh Raja Saud bin Abdul Aziz. Perempuan tidak diberikan kesempatan mengakses pendidikan seluas-luasnya layaknya laki-laki. Pada 1960, pertama kali dibuka sekolah dasar untuk perempuan di Riyadh dan kesempatan akses pendidikan bagi perempuan saat itu hanya sebatas memperdalam ilmu Al-Qur'an, hadis, dan sunnah. Adapun ketika sudah memasuki era pubertas, pendidikan perempuan di luar rumah dihentikan dan proses pengasingan ketat di rumah berikut aturan keharusan mengenakan jilbab di ruang publik mulai diberlakukan (Hamdan, 2005: 47). Arah pendidikan perempuan saat itu lebih kepada mempersiapkan mereka menjadi calon istri yang baik (Al-Suwaida, 2016: 112), karena peran utama perempuan adalah sebagai pengasuh anak dan ibu rumah tangga, tidak lebih dari itu (Sabbagh, 2016: 21).

Diskriminasi dalam pendidikan sangat dirasakan oleh perempuan Saudi kala itu di semua jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum yang bias gender sampai pada taraf

pemilihan jurusan di tingkat studi lanjut universitas. Perempuan Saudi tidak diberikan keleluasaan untuk memilih konsentrasi jurusan pada tingkat universitas, dan tidak semua gelar kesarjanaan di Saudi diperuntukkan bagi perempuan. Terdapat beberapa jurusan yang hanya bisa diakses dan diperuntukkan bagi laki-laki seperti jurusan hukum (*law*) dan insinyur (*engineer*) (Mills, 2022). Ketidakadilan dalam sektor pendidikan ini berdampak serius pada sektor pekerjaan di mana perempuan Saudi nyaris tidak ada yang bekerja di sektor publik seperti arsitek maupun praktisi hukum. Akses pendidikan yang terbatas menjadikan peran mereka hanya berkutat pada wilayah domestik. Padahal, jika diberikan akses pendidikan terbaik, mereka dapat berkontribusi nyata untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan negara (Bakki, 2004: 6).

Sebagai imbas pembatasan pendidikan, perempuan Saudi juga kerap kali termarginalkan di sektor pekerjaan dan karier. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmed Al-Asfour dan kawan-kawan berjudul "Saudi Women's Work Challenges and Barriers to Career Advancement" yang diterbitkan oleh *Emerald Insight*, disajikan sebuah fakta bahwa perempuan Saudi mengalami banyak hambatan dalam mendapatkan pekerjaan. Kesempatan bekerja bagi mereka sangat terbatas. Melalui wawancara dengan beberapa perempuan Saudi terkait pekerjaan, mereka menyampaikan keluhan akan kesempatan kerja yang sangat terbatas. Di antaranya adalah keluhan yang disampaikan oleh salah seorang pelajar yang mendapatkan gelar keperawatan namun tidak bisa mengakses karier perawat. Di antara mereka juga menyatakan bahwa di Saudi tidak ada satu pun perempuan yang bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan, semuanya didominasi laki-laki. Kesempatan bisnis pun sangat terbatas. Padahal, Siti Khadijah istri Nabi Muhammad Saw. merupakan sosok perempuan yang pandai berbisnis. Tidak banyak perempuan Saudi yang melakukan bisnis berupa perdagangan karena tersandung aturan jika keluar rumah harus didampingi mahram (Al-Asfour, 2017: 7). Pembatasan dan subordinasi yang dialami perempuan Saudi ditengarai bersumber dari pemahaman ultra-konservatif ulama Wahabi yang terejewantahkan dalam beberapa fatwa mereka.

Sejarah Singkat Wahabi dan Pandangannya terhadap Kesetaraan Gender

Teologi Wahabi merupakan suatu mazhab yang diusung dan dinisbatkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab (1703 - 1791) pada abad ke-18. Wahab menekuni ilmu agama seperti fikih dan ilmu kalam di Makkah dan Madinah dan dia sangat mengidolakan sosok Ibnu Taimiyah, salah satu tokoh dalam Islam yang cara keberagamaannya sangat rigid dan puritan sehingga tidak mengherankan dalam praktik keberagamaan, Muhammad ibn Abdul Wahab pun sama persis sebagaimana yang dipraktikkan oleh Ibnu Taimiyah (Esposito, 2003: 59). Inti dari ajaran yang diusung oleh Muhammad ibn Abdul Wahab ini adalah *tauhid*, yaitu memurnikan ajaran Islam dari aneka macam penambahan dalam ibadah yang sering kali disebut bid'ah atau perkara baru yang tidak diikuti oleh para sahabat dan tabi'in (Algar, 2011: 50) dan mengembalikannya kepada teks Al-Qur'an dan hadis.

Implikasi dari pemahaman semacam ini adalah segala bentuk perbuatan yang tidak merujuk pada *nash*, maka patut di jauhi, apabila perlu, dihancurkan. Wahabi mengharamkan segala bentuk praktik agama yang bersinggungan dengan tradisi. Mereka juga membid'ahkan praktik agama yang dianggap baru dan keluar dari autentisitas ajaran Nabi Muhammad Saw. Konsekuensi logis dari cara pandang keagamaan semacam ini adalah legimitasi tindakan anarkis terhadap ritus keagamaan yang tidak sejalan dengan spirit doktrin Wahabi, misalnya kelompok ini tidak segan menghancurkan situs bersejarah seperti tempat suci, makam kuno, bahkan makam Nabi Muhammad dan para sahabat tidak luput dari agenda penghancuran kelompok Wahabi dengan alasan kekhawatiran jatuh pada perbuatan syirik (Esposito, 2003: 59).

Pada awal kelahirannya, Wahabi tidak lebih dari gerakan ideologi. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Wahabi untuk bertransformasi menjadi gerakan politik karena

menjalin relasi mesra dengan Muhammad bin Saud. Romantisme yang terjalin antara keduanya telah mengantarkan Saudi menjadi negara eksklusif. Di sisi lain, keduanya memiliki relasi simbiosis mutualisme di mana kerajaan mendapatkan keuntungan berupa legitimasi fatwa dari ulama Wahabi dalam merumuskan kebijakan. Dan, para ulama di lingkungan kerajaan diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk memperluas pengaruh dari ajarannya (Mas'odi, 2020: 53). Dalam hal ini, Muhammad ibn Abdul Wahab menawarkan konsep masyarakat wajib taat secara mutlak kepada pemimpin yang berkuasa dan menolak untuk bermusyawarah sehingga kerajaan mendapatkan legitimasi untuk melanggengkan *status quo* (Al-Asymawi, 2004: 88).

Doktrin Wahabi yang rigid ini juga berimbas pada status perempuan, di mana perempuan Saudi harus menerima kenyataan pahit dan merasakan kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Semenjak perkawinan rezim Saudi dengan teologi Salafi-Wahabi, berbagai fatwa telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa Kerajaan Saudi yang dipimpin dan beranggotakan mayoritas ulama beraliran garis keras. Kesetaraan gender yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan, domestifikasi dan hak publik perempuan menjadi isu sentral dan dianggap sesuatu yang diskriminatif oleh banyak kalangan. Adalah kitab *Ad-Durar as-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah* yang berjumlah 16 jilid merupakan kitab yang mendokumentasikan berbagai fatwa ulama Wahabi mulai dari sang pendiri, Muhammad ibn Abdul Wahab, sampai fatwa ulama Wahabi di akhir abad ke-20. Di jilid ke-16, secara tegas dinyatakan oleh tiga ulama pentolan Wahabi, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullatif, Syekh Abdullah bin Sulaiman bin Humaid bahwa kedudukan laki-laki tidak setara dengan perempuan, laki-laki dianggap lebih unggul atas perempuan dari segi apa pun (An-Najdi, 39).

Selain itu, ada juga fatwa yang diproduksi oleh ulama secara individu, misalnya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin. Ada juga lembaga negara yang secara khusus memproduksi fatwa bernama Al-Lajnah al-Daimah fi al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta (Badan Negara Urusan Pengetahuan dan Fatwa Keagamaan) di mana badan ini sejak 1975 diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz hingga wafatnya pada 1999 dan digantikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Alu As-Syaikh yang merupakan wakilnya. Badan ini berisikan ulama yang berhaluan Salafi-Wahabi. Fatwa terkait relasi laki-laki dan perempuan menjadi salah satu fatwa yang menjadi perhatian dan porsi cukup besar. Sebagian fatwa dari lembaga fatwa ini dibukukan oleh Khalid Al-Juraisi berjudul *al-Fatawa asy-Sayr'iah fi al-Masa'il al-'Asriyah min Fatawa 'Ulama al-Balad al-Haram* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fatwa-Tatwa Terkini* terbitan Darul Haq Jakarta sebanyak tiga jilid. Secara eksplisit, dapat dilihat pandangan diskriminatif ulama Salafi-Wahabi dalam fatwa-fatwa tersebut. Misalnya, fatwa terkait pakaian perempuan, perhiasan perempuan, bekerja di luar rumah, keluar ke pasar, ke luar negeri untuk pendidikan, hingga fatwa larangan mengemudi mobil (Abdul Kodir, 2012: 154).

Melalui fatwa-fatwa tersebut, perempuan Saudi merasa diperlakukan tidak adil dan merasa tidak ada kebebasan. Hak-hak mereka dirampas dan dianggap sebagai makhluk sosial kelas dua yang apabila keluar dari rumah dapat mengganggu stabilitas sosial karena dianggap sebagai pembawa fitnah bagi laki-laki. Pandangan semacam ini tentu sangat bias gender dan diskriminatif. Bagi kelompok feminis, semestinya perempuan harus dibebaskan dari ketertindasan dan keterbelengguan. Sebagai respons, banyak perempuan Saudi yang berusaha mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka. Mereka mulai membangun gerakan untuk melawan diskriminasi gender dan memperjuangkan hak-hak mereka yang telah lama ditindas. Menyadari bahwa perubahan ini tidak akan datang dengan mudah, mereka menunjukkan ketabahan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam beberapa kasus, upaya ini telah menghasilkan perubahan positif, seperti reformasi baru dalam hukum dan kebijakan yang memberikan lebih banyak hak dan kebebasan kepada wanita. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai

kesetaraan gender yang sejati dan memastikan bahwa setiap wanita Saudi memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan.

Pilihan Rasional (*Rational Choice*): Menuju Saudi Baru yang Inklusif

Awalnya, teori pilihan rasional digunakan untuk menganalisis sektor ekonomi. Namun pada perkembangannya, teori ini juga digunakan untuk melihat pola perilaku sosial sampai perspektif aktor hubungan internasional. Menurut Pavlicic, teori pilihan rasional berpandangan tentang bagaimana sebuah kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan yang dipandang maksimal. Lebih lanjut dikatakan bahwa individu rasional adalah orang yang mampu mendefinisikan masalah, menetapkan tujuan yang jelas, sekaligus menetapkan alternatif pilihan untuk mencapai tujuan (Eriksson, 2011: 3).

Mary Zey dalam bukunya yang berjudul *Rational Choice Theory and Organizational Theory: A Critique* menjelaskan bahwa pilihan rasional (RCT) dijalankan oleh aktor, baik individual, kelompok, maupun entitas lembaga sesuai dengan hierarki kepentingannya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (*benefit*) dan meminimalisasi biaya (*cost*) (Mary Zey, 1998: 2). Senada dengan Mary Zey, Mas'ood juga mengatakan pilihan rasional berpusat pada asumsi *cost & benefit* di mana memusatkan diri terhadap individu pemerintah untuk membuat keputusan pemerintah yang berpandangan pada untung dan rugi yang akan didapat atas keputusan yang dibuat tersebut (Mas'ood, 2003: 13).

Ronapea mengatakan bahwa keputusan atau kebijakan yang dibuat berlandaskan pilihan rasional sebenarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara. Fungsi dari kepentingan nasional itu sendiri sebagai patokan para pemimpin dalam melakukan hubungan luar negeri sekaligus untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melakukan interaksi di dunia internasional (Ronapea, 2022). Dalam konteks artikel ini, teori pilihan rasional menjadi relevan untuk menganalisis pragmatisme kebijakan Arab Saudi dalam mereformasi kehidupan sosial, terutama yang menyangkut hak-hak perempuan. Arab Saudi tentu harus memikirkan secara matang terkait kebijakan yang diputuskan karena setiap kebijakan akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Perspektif ekonomi, geopolitik, dan geostrategis terlihat sangat dominan dalam melihat perilaku Arab Saudi.

Stigma Saudi sebagai negara yang eksklusif telah mengakar selama berabad-abad lamanya. Tidak ada *benefit* yang didapatkan dengan menerapkan kebijakan eksklusif yang berdampak pada peminggiran perempuan. Yang terjadi justru Saudi merugi karena perempuan yang pada dasarnya memiliki kesempatan yang setara tidak diikutsertakan dalam kehidupan ruang publik. Seiring berjalannya waktu, penting bagi Saudi untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari stigma eksklusif ini. Menurut beberapa penelitian, peran wanita dalam ruang publik sangat penting untuk perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan mengecualikan separuh populasi dari partisipasi aktif dalam masyarakat, negara tersebut membatasi potensi produktivitas dan inovasinya sendiri. Jadi, perubahan paradigma yang mendorong inklusi dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor masyarakat bukan hanya pertanyaan moral dan sosial, tetapi juga ekonomi. Arab Saudi perlu melihat potensi yang belum tergali ini untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Domestifikasi ini terjadi sejak beberapa dekade lama. Perempuan Saudi terkungkung dalam keterbatasan dan hak mereka dikebiri. Namun, kini, mereka mulai merasakan atmosfer kebebasan ketika Saudi dipimpin oleh Raja Salman bin Abdullah yang titahnya akan berlanjut ke tangan putra mahkota Mohamed bin Salman. Keran kebebasan bagi perempuan tertuang dalam beberapa aturan dan kebijakan kerajaan yang mulai melunak bahkan cenderung liberal, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Inklusivitas Kerajaan Saudi terejewantahkan dalam beberapa kasus, di antaranya seperti penghapusan larangan mengemudi bagi perempuan, diperkenankan bagi perempuan untuk bepergian tanpa pendamping (mahram), diperbolehkan menonton di stadion,

maksimalisasi pemberdayaan pekerja perempuan di sektor publik, dan partisipasi aktif perempuan dalam gelaran pemilu (El Shamy, 2022).

Kesetaraan gender yang kini tengah dinikmati perempuan Saudi merupakan konsekuensi logis dari pilihan yang diambil oleh Saudi dalam rangka modernisasi negaranya menuju Saudi baru dengan visi 2030. Untuk mendukung kepentingannya, Saudi membebaskan perempuan dari segala belenggu diskriminasi karena bagaimanapun perempuan adalah agen yang dapat menciptakan perubahan. Terlebih Mohamed bin Salman dengan megaproyeknya melalui visi 2030 hendak menjadikan Saudi negara inklusif dan toleran sehingga perlu dilakukan reformasi besar-besaran dalam berbagai sektor, khususnya pemberdayaan perempuan. Usaha untuk mengubah wajah Saudi yang ultra-konservatif menjadi moderat berdampak pada peminggiran fatwa yang diproduksi ulama Wahabi yang fundamentalis, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak perempuan mulai disingkirkan karena dianggap akan menghambat megaproyek yang tengah diusungnya. Kebijakan ini merupakan pilihan rasional bagi Saudi karena bagaimanapun perempuan Saudi harus produktif dan menjadi mitra sejajar laki-laki sehingga harapannya dapat berpartisipasi aktif ikut memajukan negara. Dan, tidak ada pilihan lain, kecuali membebaskan perempuan untuk melakukan berbagai hal yang disukainya, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, maupun pemberdayaan perempuan di seluruh ruang publik (Mashuri, 2022).

KESIMPULAN

Arab Saudi sebagai salah satu negara besar di Timur Tengah memiliki populasi perempuan yang cukup banyak. Namun, dalam lintasan sejarah, perempuan Saudi kerap mendapatkan ketidakadilan. Gerak mereka sangat terbatas karena tersandung budaya *patriarkhal* dan teologi konservatisme Wahabi. Selama beberapa dekade, peran perempuan Saudi terbatas hanya pada ranah domestik. Padahal, jika mereka diberikan kesempatan untuk setara dengan laki-laki, terutama di ruang publik, mereka dapat menjadi agen perubahan.

Diskriminasi dan subordinasi yang dialami perempuan Saudi menjadikan negara ini negara eksklusif yang kerap dinilai melanggar hak dan kebebasan perempuan yang pada akhirnya menjadikan negara lain enggan bermitra dengan Saudi di berbagai sektor. Tidak ingin larut dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Saudi memilih untuk melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor sebagai konsekuensi dari pemenuhan kepentingan nasional dalam rangka suksesi visi Saudi 2030.

Pragmatisme Saudi berdampak pada hak-hak perempuan, ketika hari ini perempuan Saudi tengah menikmati kebebasan di semua sektor, baik pendidikan, pekerjaan, maupun peran-peran lain di ruang publik. Perempuan Saudi hari ini disejajarkan dengan laki-laki. Mohamed bin Salman sebagai putra mahkota menilai perempuan merupakan agen yang dapat berkontribusi nyata membangun negara, khususnya dalam rangka suksesi Visi 2030.

Penelitian ini tentunya masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan lebih lanjut karena ada beberapa *blind spot* atau ruang kosong yang bisa diisi. Misalnya, mengapa Saudi hari ini sangat berbeda dengan Saudi dalam beberapa dekade terakhir, terkait dengan teologi Wahabi yang konservatif, bagaimana relasi kuasa dan teologi Wahabi pasca-Mohamed bin Salman melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan perempuan, dan apakah peran perempuan Saudi semenjak bebas dari belenggu aturan rigid sudah signifikan dalam rangka suksesi Visi 2030. Semua itu perlu dikaji secara komprehensif dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asymawi, Muhammad Said. (2004). *Ma'alim al-Islam*. Al-Instishar al-'Arabi.
Al-Hareth, Yahya, dkk. (2015). Review of women and society in Saudi Arabia. *American Journal of Educational Research*, 3 (2).

- Alsuwaida, Nouf. Women's education in Saudi Arabia. *Journal of International Education Reesearch*, 1 (2), 112.
- Al-Asfour, Ahmed, Hayfaa Tlaiss, Sami Khan, James Rajasekar. (2016). Saudi women's work challenges and barriers to career advancement. *Career Development International*, 6-7.
- Algar, Hamid. (2011). *Wahabisme: Sebuah tinjauan kritis*. Jakarta: Democracy Project.
- Baki, Roula. Gender-segregated education in Saudi Arabia: Its impact on social norms and the Saudi labor market. *Education Policy Analysis Archives*, 12(28), 6.
- Bank, I. B. *Achieving universal access to ID: Gender-based legal barriers against women and good practice reforms*. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/606011569301719515/pdf/Achieving-Universal-Access-to-ID-Gender-based-Legal-Barriers-Against-Women-and-Good-Practice-Reforms.pdf>, pada 3 Juli 2022
- El-Shamy, Aly. *Saudi women embracing new freedoms this international women's day*. <https://eng.majalla.com/node/82456/saudi-women-embracing-new-freedoms-this-international-women%E2%80%99s-day>, pada 30 Juni 2022
- Esposito, John L. (2003). *Unholy war*. LKiS.
- Hamdan, Amani. (2005). Women and education in Saudi Arabia, challenges, and achievements. *International Educational Journal*.
- Hardiyanti, Mega & Sri Yuniati. (2021). Penjaminan hak-hak perempuan dalam visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee of women's rights in vision Saudi Arabia 2030. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1).
- H. Bowen, Wayne. (2015). *The history of Saudi Arabia*. ABC-Clio.
- Jannah Ismail, Nur. (2015). Rekonstruksi tafsir perempuan: Membangun tafsir berkeadilan gender. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1).
- Juliani, Anita & Radea Yuli Hambali. (2022). Teologi pembebasan perempuan perspektif Asghar Ali Engineer. *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 31.
- Mas'odi. (2020). Wahhabisme vis-à-vis reformasi Arab Saudi: MBS, agensi, moderasi, dan diversifikasi ekonomi. *Jurnal Al-Irfan*, 3(1), 53.
- Mas'ood, Muchtar. (2003). *Negara, kapital, dan demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Mobaraki, A.E.H, & B. Soderfeldt. Gender inequity in Saudi Arabia and its role in public health. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 16(1), 116.
- Muhaemin. (2018). Asghar Ali Engineer dan reformulasi makna tauhid. *Jurnal Akidah-Tauhid*, 4(1), 132.
- Mills, Andrew. *Reforms to women's education make slow progress in Saudi Arabia*. <https://www.chronicle.com/article/reforms-to-womens-education-make-slow-progress-in-saudi-arabia/>
- Najdi, Muhammad Abdurrahman. (n.d). *Ad-durar as-saniyyah fi al-ajwibah an-najdiyah: Majmu'ah rasa'il wa masa'il 'ulama najd al-a'lam min 'asr asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhâb ila 'asrina hadza*.
- Nuryatno, M. Agus. (2007). Examining Asghar Ali Engineer's qur'anic interpretation of women in Islam, *Al-Jami'ah*, 45 (2).
- _____. (2001). *Islam, teologi pembebasan, dan kesetaraan gender: Studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*. UII Press.
- N. A., Mujihastuti. (2019). *Analisis perubahan kebijakan Arab Saudi tentang peran perempuan di ranah publik: Studi kasus Royal Decree No. M/95 Tahun 2017*.
- Ronapea (2022). Konsep kepentingan nasional dalam hubungan internasional. <https://ronapea-fisip16.web.unair.ac.id>
- Sabbagh, Suha. (1996). *Arab women: Between defiance and restraint*. Olive Branch Press.
- Salim, Hairus. (2010). Menimbang teologi pembebasan Islam: Refleksi pemikiran Asghar Ali Engineer. *Orientasi Baru*, 19(2), 140.

The World Bank (2022, June). Population female of Saudi Arabia.
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN?locations=SA>
Zey, Mary. (1998). *Rational choice theory and organizational theory: A critique*. Sage Publications.